

DAFTAR PUSTAKA

- DiMaggio, Paul J and Walter W Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, Yale University.
- Fauziah. 2014. Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis Logic Model Studi Pada Pemerintah Kota Tangerang. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Longo, P. 2002. *Setting Outcomes, Measuring Result A Workshop on Performance Measurement*. Paper Presented by the Ohio Department Of Job and Family Services ang ILGARD - Ohio Universty.
- LAN. 2004. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi Kedua, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Rasul, Syahrudin, 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Rahmadoni. 2014. Analisis Terhadap Evaluasi Atas LAKIP Berbasis Hasil Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.